UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi kebijakan ketertiban sosial :: Studi kasus Perda Nomor 6 Tahun 2002 di Kota Batam
GIRSANG, Hemat, Drs. Mashuri Maschab, SU
Universitas Gadjah Mada, 2004 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

INTISARI

Batam yang terletak di lintasan perdagangan dunia sejak era 1990-an mengalami perkembangan yang pesat sebagai kota industri, perdagangan, pariwisata dan galangan kapal. Pertumbuhan ekonomi Batam dikembangkan bukan hanya untuk kepentingan daerah ini, namun juga pendukung utama ekonomi secara nasional. Tingginya pertumbuhan ekonomi di daerah ini, diikuti pula dengan tingginya migrasi penduduk terutama periode 1990-2000 mencapai 12,87 %. Seiring dengan tingginya migrasi penduduk ke Batam, menimbulkan berbagai masalah-masalah sosial. Salah satu masalah sosial yang dianggap telah menimbulkan dampak negatif adalah maraknya praktek-praktek prostitusi yang bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, menjadikan Kota Batam sebagai daerah otonom, dan menerima kewenangan yang besar. Atas dasar kewenangan tersebut Pemerintah Kota Batam bersama DPRD membuat kebijakan Perda No. 6 tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam. Melalui kebijakan ini diharapkan lokalisasi prostitusi di Kota Batam akan mampu untuk ditertibkan.

Penelitian ini berjudul "Implementasi Kebijakan Ketertiban Sosial", suatu studi kasus Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2002 di Kota Batam. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui deskripsi bagaimana implementasi Perda Nomor 6 tahun 2002 dilaksanakan, secara khusus terhadap pemindahan lokalisasi prostitusi ke Pusat Rehabilitasi Sosial Non Panti. Sejalan dengan pemikiran Grindle, keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh konten kebijakan dan konteks implementasinya. Konten kebijakan Perda ini adalah pemindahan lokalisasi prostitusi ke Pusat Rehabilitasi Sosial Non Panti, Pengawasan ketat sehingga jumlah PSK tidak bertambah, Pembinaan agama, sosial dan ekonomi, dan setelah dilakukan pengawasan dan pembinaan, dalam waktu 3 tahun berikutnya dilakukan penutupan Pusat Rehabilitasi Sosial Non Panti. Munculnya kebijakan ini tanpa melibatkan kelompok sasaran, sehingga menimbulkan resistensi dalam implementasinya. Konteks Batam yang dibangun sebagai pusat industri untuk pertumbuhan ekonomi nasional, dan sebagai daerah pariwisata terutama wisata hiburan turut mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi kebijakan Perda tersebut.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa implementasi kebijakan Perda Nomor 6 tahun 2002, khsususnya terhadap penertiban lokalisasi prostitusi di Kota Batam belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut disebabkan karena kebijakan dibuat tanpa melibatkan kelompok sasaran, anggaran yang minim, koordinasi yang kurang berjalan baik, polemik eksistensi Dinas Sosial, serta masih adanya oknum aparat keamanan maupun birokrasi yang mengambil keuntungan dari praktek-praktek prostitusi.

Kata kunci : Implementasi kebijakan, Penertiban, Lokalisasi, Prostitusi.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Implementasi kebijakan ketertiban sosial :: Studi kasus Perda Nomor 6 Tahun 2002 di Kota Batam
GIRSANG, Hemat, Drs. Mashuri Maschab, SU
Universitas Gadjah Mada, 2004 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ABSTRACT

Since 1990, Batam that lies over global trade route had grown to be a city of industry, trade, tourism, and ship port. Economic growth in Batam also contributes to national economic growth. The increase of Batam's economic growth followed by the increase of migration especially during 1990 - 2000 reached the point of 12.87 %. Migration to Batam brought a variety of social problems. One of the social problem that caused negative impacts is prostitution, a practice that against religious and decency norms. Through the implementation of Law Number 22-1999 and Law Number 53-1999, Batam became autonomous region and receive more authorities. Based on those authorities, Local Government of Batam and Batam Local Parliament (DPRD) formulate Local Regulation (Perda) Number 6- 2002 regarding Social Order in Batam City.

The title of this research is "Implementation of Social Order Policy", A Case Study of Local Regulation Number 6-2002 in Batam City. The purpose of this study is to describe the implementation of Local Regulation Number 6-2002, focusing to the removal of prostitution area to the Non Residence Social Rehabilitation Centre. According to Grindle, the success of policy implementation influenced by policy content and context. The content of this policy is to remove prostitution localization to the Non Residence Social Rehabilitation Centre; strict monitoring to decrease quantity of prostitutes; regilious, social, and economic guidance. After monitoring and guidance, within the next 3 years, local government will close the Non Residence Social Rehabilitation Centre. The formulation of this policy did not include target groups. This caused resistance in it implementation. Meanwhile, context of Batam as industrial centre for national economic growth, and as tourism area, espcially entertaining tourism influenced the succes of this policy implementation.

This research described that Local Regulation Number 6-2002 to create order in prostitution localization in Batam had not been optimally implemented yet. This caused by the policy formulation that did not involve target groups; minimum budget; the lack of coordination; countroversy concerning existence of Social Agency; and the corrupt behaviour both in public security personnel and bureaucrats who take advantage from prostitution practice.

***Keywords**: policy implementation, order, localization, prostitution*